

**ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN NELAYAN
DI NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Srata 1 (S1)
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

SEPTINA KHAIRANI

BP/NIM: 2005/67850

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2009

ABSTRAK

Septina Khairani (67850-2005): Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) Distribusi pendapatan perorangan nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan (2) Distribusi pendapatan fungsional nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, penelitian ini dilakukan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan selama dua minggu. Jenis data menurut pengumpulannya adalah data primer dan data sekunder, dan menurut waktunya adalah *cross section*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument kuisisioner atau angket yang di isi oleh nelayan mengenai pendapatan selama satu minggu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis Gini Rasio.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Distribusi pendapatan perorangan nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil Gini Rasio sebesar 0,414 yang berarti distribusi pendapatan perorangan nelayan berada pada kategori ketimpangan sedang dengan rata-rata pendapatan perorangan nelayan sebesar Rp.1.478.719,10,- per minggu. (2) Distribusi pendapatan fungsional nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil Gini Rasio sebesar 0,413 yang berarti distribusi pendapatan fungsional nelayan berada pada kategori ketimpangan sedang dengan rata-rata pendapatan fungsional nelayan sebesar Rp.1.411.921,35,- per minggu.

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan (1) Bagi nelayan yang mempunyai pendapatan rendah yang berada di bawah Rp.360.000,- diharapkan mempunyai mata pencaharian lain di luar sektor perikanan sehingga distribusi pendapatan perorangan nelayan lebih merata. (2) Dalam upaya memperbaiki distribusi pendapatan nelayan, agar pemerintah memberikan penyuluhan kepada nelayan dalam hal pengelolaan faktor-faktor produksi supaya pendistribusian pendapatan fungsional semakin merata. (3) Bagi pemerintah daerah maupun pusat agar memberikan bantuan berupa modal kepada nelayan yang mempunyai pendapatan rendah sehingga mampu memanfaatkan bantuan tersebut dalam hal membuka usaha sampingan maupun peningkatan kualitas faktor-faktor produksi sehingga membantu meratakan distribusi pendapatan nelayan secara keseluruhan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb,

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas karunia yang yang diberikan berupa taqwa, kesehatan, kesabaran dan segalanya yang penulis rasakan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umut manusia dari alam jahiliah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Didorong oleh semua itu jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan”.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing serta memberi masukan-masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu membimbing penulis dalam memberikan saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar B.MS selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan petunjuk-petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S dan Ibu Novya Zulfa Riani, SE, M.Si selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
6. Papaku Darmansyah, A.Md dan Mamaku Gushemi, A.Ma.Pd (Alm) tercinta, kedua Saudaraku Gusdiansyah dan Rice Rizana, S.Pd serta keluarga yang mendoakan dan memberi dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2005 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya, penulis berharap skripsi ini bermanfaat pembaca umumnya dan penulis khususnya. Amin.

Padang, Pebruari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Pendapatan Perorangan	10
2. Distribusi Pendapatan Fungsional	17
3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	23
4. Temuan Penelitian Sejenis	32
B. Kerangka Konseptual	33
C. Hipotesis	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel	35
1. Populasi	35
2. Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Definisi Operasional	37

F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
1. Analisis Deskriptif	39
2. Gini Rasio	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	41
a. Letak, Batas, Pembagian dan Iklim Wilayah Penelitian	41
b. Penduduk dan Mata Pencaharian	41
2. Analisis Deskriptif	43
a. Karakteristik Nelayan	43
b. Pendapatan Nelayan	50
3. Analisis Gini Rasio	54
B. Pembahasan	58
1. Distribusi Pendapatan Perorangan Nelayan di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	58
2. Distribusi Pendapatan Fungsional Nelayan di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)	2
2. Jumlah Alat Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan	3
3. Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)	4
4. Pendapatan Nelayan	5
5. Jumlah Alat Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan	7
6. Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)	35
7. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	42
8. Mata Pencaharian Penduduk	43
9. Distribusi Frekuensi Umur Responden.....	44
10. Distribusi Frekuensi Status Perkawinan Responden.....	44
11. Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga Responden.....	45
12. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Nelayan.....	46
13. Distribusi Frekuensi Lama Bekerja Sebagai Nelayan.....	47
14. Distribusi Frekuensi Status Kepemilikan Alat Tangkap.....	48
15. Distribusi Frekuensi Jumlah Produksi Ikan.....	48
16. Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Sampingan	49
17. Distribusi Frekuensi Memperoleh Penyuluhan.....	50
18. Distribusi Frekuensi Jumlah Pendapatan Perorangan Nelayan	51
19. Distribusi Frekuensi Jumlah Pendapatan Fungsioanal Nelayan.....	53

20. Analisis Indeks Gini Rasio Pendapatan Perorangan Nelayan	55
21. Analisis Indeks Gini Rasio Pendapatan Fungsioanal Nelayan	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1. Kurva Lorenz	28
2. Interpretasi Koefisien Gini	29
3. Kerangka Konseptual	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
1. Kuisisioner	64
2. Tabulasi Data.....	67
3. Distribusi Frekuensi Umur Responden.....	70
4. Distribusi Frekuensi Status Perkawinan Responden.....	70
5. Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga Responden.....	71
6. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Nelayan.....	71
7. Distribusi Frekuensi Lama Bekerja Sebagai Nelayan.....	72
8. Distribusi Frekuensi Status Kepemilikan Alat Tangkap.....	72
9. Distribusi Frekuensi Jumlah Produksi Ikan.....	73
10. Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Sampingan	73
11. Distribusi Frekuensi Jumlah Pendapatan Perorangan.....	74
12. Distribusi Frekuensi Jumlah Pendapatan Fungsional.....	75
13. Analisis Indeks Gini Rasio Pendapatan Perorangan Nelayan.....	76
14. Analisis Indeks Gini Rasio Pendapatan Fungsional Nelayan.....	77
15. Frequency Tabel.....	78
16. Frequency Tabel Pendapatan Perorangan.....	83
17. Frequency Tabel Pendapatan Fungsional.....	84
18. Surat Penelitian.....	85
19. Izin Melaksanakan Penelitian.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang dapat memberikan kontribusi berarti terhadap perekonomian. Menurut data Produk Domestik Regional Produk (PDRB) (2003: 78) berdasarkan harga konstan bahwa sub sektor perikanan menyumbang sekitar Rp. 723.332,45 juta atau 2,8 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat. Ini berarti bahwa peluang untuk memperbesar kontribusi sub sektor perikanan bagi Sumatera Barat terbuka cukup luas, karena Sumatera Barat memiliki daerah pantai yang cukup panjang terutama di sebelah barat yang memanjang dari kabupaten Pasaman hingga kabupaten Pesisir Selatan.

Sub sektor perikanan yang terdapat di Sumatera Barat terdiri atas perikanan darat dan perikanan laut. Bagi Sumatera Barat yang salah satu batas daerahnya adalah Samudera Hindia, telah mendorong sebagian penduduknya terutama di daerah pantai di kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, Mentawai, kota Padang dan kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki mata pencarian nelayan.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi Sumatera Barat yang letaknya memanjang sepanjang Samudera Hindia memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (2003: 71) berdasarkan harga konstan bahwa sub sektor perikanan menyumbang sekitar Rp. 26.657,76

juta atau 6,16 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Pesisir Selatan.

Walaupun kontribusinya relatif cukup besar terhadap perekonomian daerah dan didukung dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sub sektor perikanan, tetapi jika dilihat dari kehidupan para nelayan pada umumnya nampak tidak juga berubah. Artinya, kehidupan ekonomi nelayan tetap saja sederhana dan tidak menunjukkan perubahan yang berarti.

Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini tentang jumlah nelayan di kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2006.

Tabel 1
Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006

Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Jumlah
Kec. Koto XI Tarusan	1.400	1.250	2.650

Sumber : Dinas Perikanan Kecamatan Koto XI Tarusan, 2006

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh data bahwa jumlah nelayan di kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2006 sebanyak 2.650 orang yang terdiri dari 1.250 orang nelayan sambilan dan 1.400 orang nelayan penuh di kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan.

Selain jumlah nelayan, alat tangkap yang digunakan di kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan berbagai macam diantaranya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Alat Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan
di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Alat Tangkap	Jumlah
1	Payang	30
2	Pukat pantai	42
3	Jaring insang hanyut	25
4	Jaring insang tetap	20
5	Trammel net	22
6	Bagan perahu	15
7	Bagan mesin	30
8	Rawai tetap	5
9	Pancing tonda	2
10	Pancing lain	40
11	Lampara dasar	10
	Jumlah	241

Sumber : Dinas Perikanan Kecamatan Koto XI Tarusan, 2007

Dari Tabel 2, terlihat bahwa berbagai jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di kecamatan Koto XI Tarusan diantaranya: Payang, Pukat pantai, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, trammel net, bagan perahu, bagan mesin, rawai tetap, pancing tonda, pancing lain dan lampara dasar dengan jumlah alat tangkap sebanyak 241 buah. Alat tangkap yang paling banyak digunakan adalah pukat pancing sebanyak 42 buah dan alat tangkap yang paling sedikit digunakan oleh nelayan di kecamatan Koto XI Tarusan adalah pancing tonda sebanyak 2 buah.

Sub sektor perikanan bagi masyarakat nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan menjadi penopang kehidupan mereka dan secara perorangan masyarakat tersebut memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan mata pencarian sebagai nelayan. Sedangkan bagi pemilik modal pendapatan mereka diperoleh dari mengelola alat tangkap (bagan, kapal tonda dan payang) pengelolaan secara fungsional ini dijadikan sebagai tulang punggung kehidupan

mereka. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya penduduk yang berusaha di bidang perikanan laut. Sebagaimana dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Nelayan Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006

Nagari	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Jumlah
Ampang Pulai	723	86	809

Sumber : Dinas Perikanan Kecamatan Koto XI Tarusan, 2006

Berdasarkan Tabel 3, tentang penduduk diperoleh data bahwa jumlah nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2006 sebanyak 809 orang yang terdiri dari 723 orang nelayan penuh dan 86 orang nelayan sambilan.

Nagari Ampang Pulai merupakan salah satu kenagarian di kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah. Mata pencarian utama penduduk di daerah tersebut adalah sebagai nelayan, baik nelayan penuh maupun nelayan sambilan.

Selanjutnya, pedesaan (nagari) dicirikan oleh kemiskinan dan keterbelakangan yang terlihat jelas dari rendahnya tingkat pendapatan dan tidak meratanya distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan suatu masalah pokok dalam pembangunan, karena ketimpangan distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan pembangunan yang diikuti oleh ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Berdasarkan observasi awal, fenomena distribusi pendapatan nelayan yang terjadi di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Pendapatan Nelayan di Nagari Ampang Pulai
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Pendapatan per minggu (Rp)
1	Lizar	175.000,-
2	Suman	750.000,-
3	Ujang Siri	200.000,-
4	Imas	225.000,-
5	Syamsudir	500.000,-
6	Munar	125.000,-
7	Iril	175.000,-
8	Dedi	150.000,-
9	Alimunar	200.000,-
10	Aslim	140.000,-
Jumlah (Σ)		2.640.000,-
Rata-rata (\bar{X})		$\frac{2.460.000,-}{10} = 246.000,-$

Sumber: Wawancara di lapangan, 2008

Berdasarkan Tabel 4, pendapatan nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan beragam, rata-rata pendapatan nelayan tersebut berkisar dari Rp.125.000,- sampai Rp.750.000,-. Pendapatan terendah dari wawancara dengan nelayan adalah sebesar Rp.125.000,- dan pendapatan tertinggi Rp.750.000,-. Rata-rata pendapatan nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan adalah sebesar Rp. 246.000,- per minggu. Perbedaan pendapatan tersebut disebabkan oleh masing-masing nelayan bekerja sebagai nelayan tradisional dan sebagai nelayan pemilik modal. Pada umumnya nelayan tradisional memperoleh pendapatan di bawah pendapatan pemilik modal (pendapatan fungsional).

Dimana distribusi pendapatan perorangan menurut Todaro (2003:222) merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak

pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan.

Sedangkan, distribusi pendapatan fungsional menurut Todaro (2003:222) merupakan ukuran distribusi pendapatan fungsional ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan merupakan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik).

Adapun distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh pendidikan para nelayan, sebagian besar nelayan beranggapan untuk menjadi seorang nelayan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena menjadi seorang nelayan hanya butuh keahlian dalam berenang. Selanjutnya, alat tangkap yang digunakan nelayan juga mempengaruhi distribusi pendapatan yang meliputi distribusi perorangan dan distribusi fungsional, alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan juga bermacam-macam diantaranya pukot kantong, jaring insang, jaring angkat dan pancing. Penggunaan alat tangkap tersebut tidak merata pada masing-masing kenagarian. Penggunaan jumlah alat penangkapan ikan menurut jenis alat tangkap ikan dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Alat Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Tangkap Ikan
di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nagari	Jenis Alat tangkap				
	Pukat Kantong	Jaring Insang	Jaring Angkat	Pancing	Lampara Dasar
Ampang Pulai	30	23	17	18	4

Sumber : Dinas Perikanan Kecamatan Koto XI Tarusan, 2007

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa alat tangkap yang banyak digunakan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan adalah pukat kantong sebanyak 30 unit. Alat tangkap yang paling sedikit digunakan oleh nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan adalah lampara dasar sebanyak 4 unit.

Nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan memiliki potensi perikanan laut yang tinggi dan jumlah nelayan yang cukup banyak, seharusnya kehidupan dan pendapatan nelayan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup karena telah bekerja setiap hari. Tetapi pada kenyataannya pendapatan masyarakat nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan tidak sesuai dengan potensi laut yang dimiliki dan perbedaan pendapatan serta pendistribusian antara pendapatan perorangan dengan pendapatan pemilik modal atau pemilik faktor-faktor produksi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut mengenai kehidupan nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS DISTRIBUSI PENDAPATAN NELAYAN DI NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah distribusi pendapatan perorangan nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah distribusi pendapatan fungsional nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui distribusi pendapatan nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan, tujuan lebih rinci adalah:

1. Untuk mengetahui distribusi pendapatan perorangan nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui distribusi pendapatan fungsional nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ekonomi mikro.
2. Dapat dijadikan masukan kepada pemerintah terutama Dinas Perikanan dalam penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan masalah

pendistribusian pendapatan nelayan di kabupaten Pesisir Selatan khususnya dan di Sumatera Barat umumnya.

3. Dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut tentang distribusi pendapatan nelayan.
4. Dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Srata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Perorangan

Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran, dan yang lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah harta pada awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya yang dikonsumsi.

Distribusi pendapatan seseorang atau distribusi ukuran pendapatan merupakan indikator yang sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.

Menurut Todaro (2003:222) distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya

berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan.

Selain itu, pendapatan menurut Winardi dalam Oktavianus (2007:20) pendapatan (*income*) secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas.

Pendapatan (*income*) dari seseorang (rumah tangga) adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi (Boediono;1982:140). Ini menegaskan bahwa sektor produksi tersebut juga membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input dalam rangka proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar.

Secara singkat faktor pendapatan seseorang ditentukan oleh jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki dan harga masing-masing faktor produksi tersebut. Sumber pendapatan masyarakat pedesaan umumnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Pendapatan tersebut adalah pendapatan yang berasal dari dalam usaha tani melalui kegiatan usaha tani (*farm activities*) dan berasal dari luar usaha tani melalui kegiatan non usaha tani (*non farm activities*). Pendapatan usaha tani merupakan suatu bentuk imbalan dari jasa pengelolaan (petani), tenaga kerja dan modal yang dimiliki (termasuk di dalamnya lahan) yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dalam usaha tani (Soekartawi; 1986: 116).

Selanjutnya, pendapatan di luar usaha tani adalah imbalan yang diperoleh akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar usaha tani, pendapatan di dalam usaha tani merupakan balas jasa faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal dan jasa pengolahan. Pendapatan (Y) diperoleh dari selisih penerimaan ($TR=Total Revenue$) dari penjualan komoditas (Q) yang dihasilkan dengan jumlah biaya ($TC=Total Cos$) yang dikeluarkan untuk menghasilkan komoditas tersebut (Boediono; 1982: 89), maka secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = TR - TC \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$= P_oQ - P_nN \quad \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

Y = Pendapatan usaha tani

P_o = Harga output

Q = Output

P_n = Harga input

N = Input

Pendapatan petani menurut Adiwilaga (1980:115), merupakan pendapatan yang bisa berupa padi, uang dan juga bisa berupa barang lain yang bukan padi. Karena keterbatasan petani dalam menggarap lahan pertanian menyebabkan sumber pendapatan mereka pada umumnya tidak berasal dari sektor pertanian saja, tetapi mereka juga berusaha memperoleh pendapatan dari sumber lain di luar usaha tani.

Soekartawi (1986:78), menyatakan bahwa jika sumber pendapatan keluarga petani berasal dari dua sumber yaitu dari usaha tani dan non usaha tani, maka total pendapatan keluarga tani tersebut adalah:

$$Y_{tot} = Y_1 + Y_2 \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$= (TR_1 - TC_1) + (TR_2 - TC_2) \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

Y₁ = Pendapatan usaha tani

Y₂ = Pendapatan non usaha tani

Dikutip oleh Asmadia (2004:11) ada beberapa konsep untuk menentukan perhitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan bersih adalah pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$Y_B = PQ - \sum r_i x_i \dots\dots\dots(5)$$

Y_B = Pendapatan bersih

P = Harga output

Q = Total harga

r_i = Harga input ke (i)

x_i = Jumlah input ke (i)

I = 1,2,3.....n

- b. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari semua cabang dan sumber di dalam usaha tani maupun di luar usaha tani selama satu tahun. Untuk menghitung pendapatan kotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$YK = P.Q \dots\dots\dots(6)$$

Dimana:

YK = Pendapatan kotor

P = Harga output

Q = Total output

Selanjutnya, untuk menetapkan pendapatan kotor dari tiap-tiap cabang usaha tani maupun di luar usaha tani (Soekartawi;1986:80)

- a. Jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan dengan mengingat akan adanya penerimaan pada permulaan dan akhir tahun.
- b. Nilai dari pengeluaran-pengeluaran berupa bahan-bahan dari usaha tani, keperluan rumah tangga dan keperluan pribadi dan lain-lain.

- c. Nilai dan bahan-bahan yang dihasilkan dari usaha tani sendiri sebagai bangunan tetap misalnya kayu untuk perumahan dan alat-alat lainnya.
- d. Hasil sewa alat-alat dan upah tenaga kerja keluarga dan pihak lain.

Biaya usaha tani adalah biaya yang betul-betul dikeluarkan selama membiayai usaha taninya yaitu dalam jangka waktu satu tahun. Dikutip oleh Asmadia (2004:12) biaya-biaya tersebut adalah:

- a. Biaya sarana produksi antara lain: bibit, pupuk, obat-obatan (pestisida) dan pengeluaran lainnya.
- b. Upah tenaga kerja, baik tenaga kerja di luar keluarga maupun tenaga kerja dalam keluarga yang diperhitungkan berdasarkan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja di luar keluarga.
- c. Pengeluaran-pengeluaran tertentu berupa bahan untuk kepentingan usaha tani, misalnya upacara selamatan menjelang musin tanam dan lain-lain.
- d. Penyusutan, yang merupakan pengganti kerugian atau pengurangan nilai disebabkan karena waktu dan cara penggunaan dari semua modal tetap seperti bangunan, alat-alat, mesin-mesin, dan sebagainya. Modal tanah biasanya tidak dikenakan biaya penyusutan karena dengan pemeliharaan dan cara penggunaan yang baik maka nilai tanah tidak akan berkurang, bahkan mungkin akan terus bertambah.

Mosher dikutip oleh Asmadia (2004:13) menyatakan bahwa pendapatan usaha tani sangat tergantung kepada salah satu yang diikutsertakan dalam proses produksi seperti tenaga kerja, produktivitas lahan garapan, kemampuan pengarahannya (manajemen), ukuran keluarga, kegiatan petani di dalam penggunaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, benih dan sarana produksi lainnya. Kegiatan usaha tani bertujuan untuk mencapai produksi yang

lebih tinggi di bidang pertanian. Petani mengalokasikan pendapatannya dalam berbagai kegunaan seperti halnya untuk biaya produksi untuk periode berikutnya, tabungan dan pengeluaran untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pendapatan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai keberhasilan suatu usaha dan juga merupakan faktor yang menentukan dalam kelangsungan suatu usaha. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau badan usaha selama jangka waktu tertentu.

Dalam Ensiklopedi di Indonesia yang di susun oleh Shadily (1989:11) menyatakan bahwa pendapatan seseorang diartikan sebagai jumlah uang dan barang yang diterima sebagai hasil kerja yang dilakukan. Apabila dilihat dari sudut pandang nelayan, maka pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima nelayan dalam melakukan kegiatan melaut.

Jhingan (2003:31), menyatakan bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu, oleh karena itu pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang baik yang digunakan untuk konsumsi maupun digunakan untuk tabungan. Dengan pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan untuk keperluan hidup atau untuk mncapai kepuasan.

Perhitungan pendapatan keluarga menurut Mubyarto (1985:67) adalah semua hasil yang diterima oleh semua anggota keluarga melalui berbagai jenis usaha kegiatan ekonomi. Tolak ukur yang digunakan adalah pendapatan pertahun dari keluarga tersebut. Pendapatan keluarga dapat dilihat dalam bentuk uang, dapat pula dalam bentuk barang atau fasilitas misalnya, rumah dinas, pengobatan gratis.

Menurut Mubyarto (1985:92) pendapatan yang diterima dapat dibedakan menjadi beberapa bagian:

“Pendapatan juga dikelompokkan dalam sektor formal, informal dan subsistem. Pendapatan sektor formal yaitu segala penghasilan baik berupa uang ataupun barang yang sifatnya reguler yang diterima biasanya balas jasa dan kontraprestasi dari sektor formal. Pendapatan dari sektor informal yaitu segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi dari sektor informal. Pendapatan sektor subsistem terjadi apabila produksi dan konsumsi terletak di tangan suatu masyarakat kecil”.

Dari uraian di atas, menggambarkan bahwa pendapatan itu merupakan masukan bagi masing-masing keluarga yang mana keadaan keluarga yang satu berbeda dengan keluarga yang lain, dan dipengaruhi oleh berbagai aktivitas keluarga tersebut baik jenis maupun macam kegiatannya. Kegiatan dan aktivitas inilah yang membedakan dan mempengaruhi pendapatan keluarga sehingga menimbulkan klasifikasi pendapatan masyarakat tinggi, sedang dan rendah.

Pengertian pendapatan menurut Valerry J. Hull yang dikutip oleh Nawi (1995:9) pendapatan adalah gambaran yang lebih tepat posisi ekonomi keluarga yang merupakan jumlah keseluruhan pendapatan atau kekayaan keluarga (termasuk semua barang dan hewan peliharaan), dipakai untuk membagi kedalam tiga kelompok pendapatan, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang dan pendapatan rendah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan perorangan merupakan pendapatan keseluruhan dari berbagai sumber penghasilan yang secara aktual diterima oleh seseorang atau rumah tangga.

2. Distribusi Pendapatan Fungsional

Menurut Brener dalam Todaro (2000:143) definisi dari teori distribusi pendapatan dapat dinyatakan bahwa teori-teori distribusi pendapatan diantara kelompok-kelompok dan individu-individu dalam perekonomian. Umumnya distribusi pendapatan dapat dibedakan atas teori distribusi pendapatan fungsional dan teori distribusi pendapatan personal atau perorangan.

Untuk menghitung jumlah penghasilan masyarakat, maka perlu dilihat distribusi pendapatan, para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi:

Menurut Todaro (2003:222) distribusi pendapatan fungsional merupakan ukuran yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi pendapatan merupakan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, modal uang, dan modal fisik).

Berdasarkan definisi dari teori distribusi pendapatan di atas, dimana distribusi pendapatan fungsional merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang sering disebut sebagai distribusi faktor yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya

perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

Adapun menurut David Ricardo dalam Jhingan (1999:88) teori distribusi pendapatan fungsional didasarkan pada asumsi bahwa:

- a. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu distribusi industri
- b. "Law of diminishing return" berlaku bagi tanah
- c. Persediaan tanah adalah tetap
- d. Permintaan akan gandum benar-benar inelastis
- e. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel
- f. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu (given)
- g. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
- h. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
- i. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal, baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja
- j. Terdapat persaingan yang sempurna
- k. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan.

Berdasarkan teori tersebut yang saling berhubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yakni tuan tanah, kapitalis dan buruh atau pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakannya. Seluruh pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok masyarakat yang masing-masingnya sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah.

Sewa per unit buruh adalah perbedaan antara produk rata-rata dan produk marginal. Keseluruhan sewa sama dengan perbedaan antara produk rata-rata dengan produk marginal dikalikan dengan banyaknya tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam pengolahan tanah. Tingkat upah ditentukan oleh cadangan upah dibagi dengan jumlah buruh (David Ricardo dalam Jhingan, 1999:89).

Jadi dari keseluruhan gandum yang dihasilkan dan dijual, sewa mempunyai prioritas utama dan sisanya (hasil dikurangi sewa) dibagi-bagikan sebagai upah dan keuntungan, sementara bunga termasuk dalam keuntungan.

Menurut Sukirno (1998:64) distribusi pendapatan di beberapa negara terdapat dua analisis di antaranya *distribusi pendapatan relatif* yang merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan *distribusi pendapatan mutlak* yaitu persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu.

Jika dilihat dari segi pendapatan nasional, maka pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. maka ada tiga metode dalam menghitung pendapatan yaitu:

a. Metode Pengeluaran

Menurut Sukirno (2000:31) pendapatan nasional yang dihitung dengan menghitung dan menaksir aliran belanja yang dilakukan rumah tangga, penanaman modal pemerintah dan luar negeri. Aliran belanja ini merupakan nilai pengeluaran yang dilakukan terhadap barang-barang akhir dan jasa akhir yang diproduksi oleh perusahaan.

Barang akhir dan jasa akhir yang dibeli rumah tangga meliputi barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jenis barang dan jasa yang digunakan tersebut meliputi bahan makanan dan minuman, berbagai jenis pakaian, barang kebutuhan rumah tangga, dan jasa-jasa yang dibutuhkan rumah tangga.

Deliarnov dalam Lestari (2005:24) menggolongkan pengeluaran sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran konsumsi, yaitu total semua pengeluaran rata-rata untuk membeli barang dan jasa keperluan rumah tangga;
- 2) Pengeluaran perusahaan atau investasi, yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal atau investasi;
- 3) Pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu pengeluaran yang bersifat konsumsinyang dilakukan pemerintah atas barang dan jasa, seperti perbaikan jalan;
- 4) Ekspor bersih, yaitu selisih ekspor dan impor.

Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, maka pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan nilai pengeluaran rumah tangga, peneluaran investasi, pengeluaran pemerintah dan ditambah dengan pengeluaran atas barang-barang import atau selisih ekspor dan impor. Sehingga Uraian di atas menyatakan bahwa dalam metode pengeluaran, pengeluaran terdiri dari pengeluaran konsumsi, non konsumsi dan tabungan.

b. Metode Pendapatan

Menurut Sukirno (2000:32) dalam metode pendapatan, yang dihitung dan ditaksir adalah nilai pendapatan dari faktor-faktor produksi, yang berupa gaji dan upah, sewa dan bunga serta keuntungan perusahaan. Pendapatan dari faktor-faktor produksi yang penting adalah upah dan gaji. Jenis pendapatan ini merupakan imbalan kepada tenaga kerja dalam perekonomian baik itu tenaga kerja terdidik ataupun tenaga kerja tak terdidik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam metode pendapatan adalah upah dan gaji, sewa, bunga dan laba.

Deliarnov dalam Lestari (2005:25) menggolongkan pendapatan atas dua yaitu: pendapatan pribadi dan pendapatan disponsibel. Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang diterima seluruh anggota baik dari hasil kerja, bea siswa,

pembayaran pensiun, dan sebagainya. Tidak semua pendapatan pribadi dapat langsung digunakan untuk tujuan konsumsi dan tabungan, sebab sebagian harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Pendapatan disponsibel adalah pendapatan pribadi yang siap digunakan untuk konsumsi.

c. Metode Produksi dan Nilai Tambah

Menurut Sukirno (2000:33) dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara perhitungan produksi dan nilai tambah yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Penggunaan metode ini dalam penghitungan pendapatan nasional mempunyai dua tujuan penting antara lain:

- 1) Untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor di dalam mewujudkan pendapatan nasional;
- 2) Sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dan nilai tambah yaitu dengan menjumlahkan nilai tambah dari berbagai sektor dalam perekonomian.

Menganalisis keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara, analisisnya mengenai beberapa gambaran mengenai distribusi pendapatan relatif maupun distribusi pendapatan mutlak. Distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang mereka terima. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi pendapatan mutlak adalah tingkat pendapatan tertentu atau persentase jumlah penduduk yang berpendapatan

mencapai suatu tingkatan tertentu atau kurang dari padanya. Dalam pengertian relatif golongan penerima pendapatan dibagi dalam kelas-kelas dengan persentase tertentu pula. Pengertian mutlak mempergunakan pendekatan garis kemiskinan. Jadi penduduk yang tidak memenuhi garis tersebut maka akan dikategorikan miskin.

Masalah pemerataan akan tetap ada selama proses pembangunan berlangsung, sebenarnya secara absolut pendapatan dari golongan yang berpendapatan rendah tidak menurun bahkan meningkat. Akan tetapi pendapatan golongan yang berpendapatan tinggi akan sangat meningkat, maka kepincangan atau ketimpangan pembagian pendapatan menjadi mencolok. Kemampuan golongan berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan seharusnya lebih cepat dibandingkan dengan golongan berpendapatan tinggi. Apabila tidak demikian, disparitas pendapatan antar golongan berpendapatan rendah dan tinggi semakin besar. Ada beberapa kenyataan bahwa pendapatan masyarakat kelompok menengah dan atas mempunyai kenaikan lebih cepat dan kelompok miskin melalui tahap-tahap pembangunan.

Beberapa ekonom berpendapat bahwa perbedaan pendapatan timbul karena pendapatan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak yang memiliki barang modal yang jumlahnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal. Perbedaan pendapatan karena kepemilikan awal faktor produksi tersebut menurut teori Neo Klasikal akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu proses penyesuaian otomatis. Dengan proses tersebut akan menetes (*trickle down*) dan menyebar sehingga menimbulkan keseimbangan

baru. Apabila setelah proses tersebut masih ada perbedaan yang cukup timpang, maka dapat dilakukan pendekatan Keynesian yaitu melalui sistem perpajakan dan subsidi perpajakan. Dengan adanya subsidi maka dapat dipergunakan sebagai alat untuk retribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya, kesenjangan distribusi pendapatan merupakan suatu masalah pokok dalam pembangunan karena distribusi pendapatan ini mencerminkan merata atau tidaknya hasil pembangunan yang dilakukan.

3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai tolak ukur untuk menilai ketidakmerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi pendapatan yang dimaksud.

Masalah distribusi pendapatan sering diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:194) ketimpangan adalah kepincangan, hal yang tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil, tidak beres), tidak merata. Jadi distribusi pendapatan adalah pendapatan yang tidak terdistribusi secara merata pada sekelompok masyarakat.

Masalah ketimpangan pembagian pendapatan sebenarnya berkaitan erat dengan perbedaan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat melalui balas jasa faktor produksinya. Pemanfaatan faktor produksi tersebut akan mencerminkan besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan perbedaan yang mencolok antar golongan berpendapatan tinggi dan rendah. Golongan yang

bependapatan tinggi mengurai hampir seluruh faktor produksi dan tenaga kerja yang merupakan faktor penentu pembagian pendapatan.

Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang menurut Adelman & Morris (1973) dalam Arsyad (1999:226-227) sebagai berikut:

- a. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunkan pendapatan per kapita;
- b. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan produksi barang-barang;
- c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
- d. Inflasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga pesentase pendapatan modal dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah;
- e. Rendahnya mobilitas sosial;
- f. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
- g. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelestarian permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang;
- h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Selain faktor-faktor di atas, Adelman dan Morris (dalam Melani, 2008:31), ketimpangan juga disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Sistem perekonomian, semakin besar peran sektor swasta dalam perekonomian maka semakin timpang distribusi pendapatan.
- b. Proporsi faktor produksi, sangat mempengaruhi distribusi pendapatan, salah satu faktor produksi yang penting adalah tenaga kerja, laju pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi akan menurunkan tingkat upah, pada giliran berikutnya hal ini akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

- c. Teknologi, dewasa ini teknologi yang ditransfer ke negara-negara berkembang kebanyakan bersifat kapital intensif, sehingga akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan akan menyebabkan pengangguran. Dengan demikian penggunaan teknologi yang padat modal akan memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan.
- d. Kebijakan fiskal, salah satu aspek kebijakan fiskal adalah penerimaan negara dari sisi pajak. Penggunaan pajak ini dapat digunakan untuk memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pembebasan biaya sekolah, pembebasan biaya listrik dan air bersih. Hal ini bisa membantu masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga mengurangi dampak ketimpangan.
- e. Strategi pembangunan, strategi substitusi impor akan cenderung meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan dibandingkan dengan distribusi orientasi ekspor. Karena dalam strategi substitusi impor harga barang-barang dalam negeri tinggi yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Akibatnya dampak ketimpangan distribusi pendapatan akan bertambah parah.

Jadi ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri substitusi impor, buruknya nilai tukar, hancurnya industri kerajinan rakyat, sistem perekonomian, proporsi faktor produksi, teknologi, kebijakan fiskal dan strategi pembangunan.

Hasil penelitian Kuznet dalam Riza (2003:22) menemukan bahwa faktor utama yang menentukan ketidakmerataan pendapatan masyarakat adalah faktor pendapatan. Dengan menggunakan data lintas negara ditemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dan diukur dari tingkat pendapatan perkapita dengan tingkat ketidakmerataan pendapatan pada tahap awal pembangunan. Namun jika pertumbuhan ekonomi sudah mantap maka terdapat kecendrungan peningkatan pendapatan yang diikuti dengan penurunan ketidakmerataan pendapatan dalam distribusi pendapatan.

Selain tingkat pendapatan perkapita, Kuznet menemukan juga bahwa penurunan peran sektor pertanian terhadap pendapatan nasional suatu negara akan cenderung meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena dalam proses *industrialisasi* terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Ketidakmerataan distribusi pendapatan juga ditentukan oleh faktor pendidikan dan pertumbuhan penduduk. Dimana pada daerah yang tidak merata distribusi pendapatannya dan tidak merata kesempatan dari memperoleh pendidikan tidak sangat seimbang dan juga tingkat pertumbuhan penduduk akan tinggi karena tingkat pendidikan yang rendah akan cenderung memiliki keluarga yang besar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini nantinya akan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat karena tidak sebanding antara tingkat pendapatan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Faktor lain yang menentukan ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah faktor kelembagaan dan kebijakan pemerintah akan menarik efek distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi, karena pertumbuhan ini akan dilaksanakan pada strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin turun ketidakmerataan distribusi pendapatan dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan atau kualitas sumber daya manusia maka ketidakmerataan distribusi pendapatan akan semakin timpang.

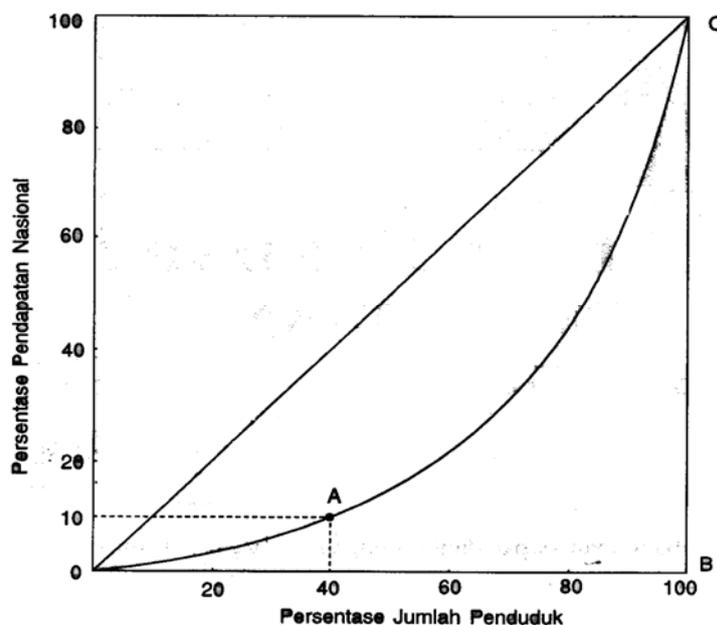
Patut ditegaskan bahwa ukuran ketimpangan distribusi pendapatan meliputi distribusi pendapatan yang mencerminkan pemerataan atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria dan tolak ukur untuk menilai pemerataan (parah atau tidaknya ketimpangan) distribusi pendapatan tersebut.

Tiga tolak ukur yang paling lazim untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro;2003:223) sebagai berikut :

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan-lapisan penduduk, kurva Lorenz terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan Sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada garis diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat pada garis diagonal (semakin lurus) menyatakan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan

keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan yang semakin timpang atau tidak merata.



Gambar 1 Kurva Lorenz

Titik A mencerminkan 40% penduduk berpendapatan terendah menghasilkan atau hanya memiliki 10% pendapatan nasional.

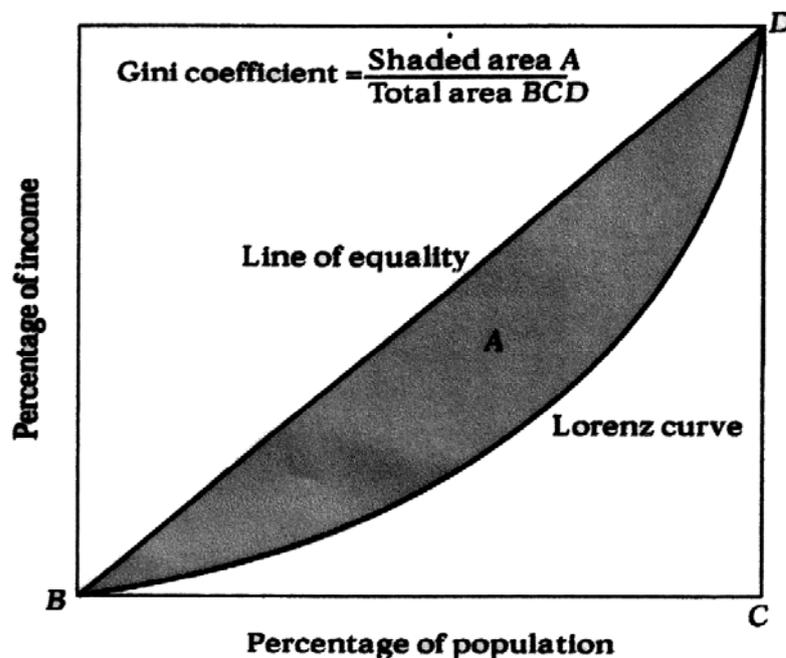
b. Koefisien Gini (*Coefission Gini*) atau Gini Rasio

Koefisien Gini atau Gini Rasio merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 – 0,57, sedangkan untuk distribusi pendapatan yang relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35.

Indeks atau Gini Rasio adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati 0) koefisiennya, maka semakin baik atau

merata distribusi pendapatan. Dan sebaliknya, semakin besar (semakin mendekati

1) koefisiennya, maka distribusi pendapatan yang semakin timpang.



Gambar 2 Interpretasi Koefisien Gini

Angka Rasio Gini dapat ditaksir secara langsung dari kurva Lorenz, yaitu perbandingan dai luas area yang terletak diantara kurva Lorenz dan diagonal terhadap luas area segitiga DBC. (Todaro;2003:226).

Dipilih Gini Rasio sebagai alat pengujian karena karena gini rasio memiliki beberapa kelebihan (Todaro;2000:226) yang dikutip dalam Melani, sebagai berikut :

- 1) Merupakan indikator yang paling terkenal dan umum digunakan;
- 2) Merupakan variabel yang dinamis dalam mengukur ketidakmerataan pendapatan baik antar daerah maupun antar sektor dalam suatu negara;
- 3) Menunjukkan kecenderungan yang sama menurut kurun waktu dan antar daerah yang dicapai dengan menggunakan ukuran yang berbeda.

Rumus Gini Rasio menurut BPS (2006:8) adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (y_i^* + y_{i-1}^*) \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

Y_i = Proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke-i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

k = Jumlah kelas

Beberapa kriteria yang dipenuhi oleh koefisien Gini bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (BPS;2006:8) antara lain:

- a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*), ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.
- b. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*), jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).
- c. Simetris, jika bertukarnya tempat tingkat pendapatan seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan.
- d. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat (BPS;2006:8) antara lain:

- a. Dapat didekomposisi, bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Koefisien Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak

bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai koefisien Gini dari sub kelompok masyarakat.

- b. Dapat diuji secara statistik, seseorang harus dapat menguji signifikan perubahan indeks antar waktu.

Untuk melihat tinggi rendahnya distribusi pendapatan nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur dengan menggunakan Gini Rasio. Menurut Todaro (2000:88) ada spesifikasi nilai Gini Rasio yaitu:

- a. 0,20 – 0,35 yaitu ketimpangan ringan
- b. 0,36 – 0,49 yaitu ketimpangan sedang
- c. 0,50 – 0,70 yaitu ketimpangan tinggi

Atau secara matematis :

$$GR = \frac{\text{Luas bidang } X}{\text{Segitiga } ABC} = \frac{X}{X + Y} \dots\dots\dots(8)$$

(Todaro;2000:12)

c. Kriteria Bank Dunia (*World Bank*)

Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga golongan, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin), 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi (penduduk terkaya).

Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi dinyatakan 40 persen penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dikatakan sedang apabila apabila 40 persen penduduk

termiskin menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional, maka ketimpangan dikatakan lunak atau distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata (Dumairy;1996:55).

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas ada tiga kriteria yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu : Kurva Lorenz, Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia (*World Bank*).

4. Temuan Penelitian Sejenis

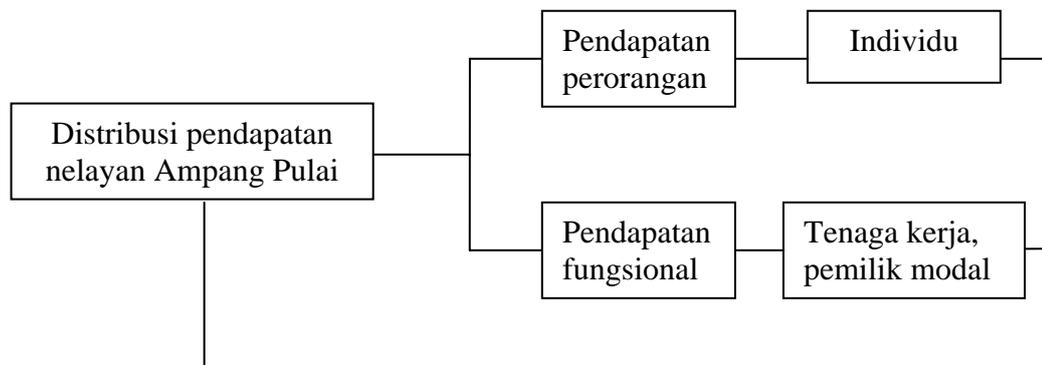
Hasil penelitian yang sejenis ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Di bawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang menghasilkan beberapa kesimpulan:

- a. Oktavianus (2007) “Analisis Distribusi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa distribusi pendapatan nelayan di kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan indeks Gini diperoleh hasil 0,29 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan pada sub sektor perikanan adalah sedang. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan adalah salah satu nagari yang merupakan bagian dari kecamatan sedangkan penelitian sejenis ini meneliti salah satu kabupaten yang merupakan bagian dari propinsi.
- b. Yasril (2004) “Analisis Penghasilan Masyarakat Nelayan di Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan ketimpangan melalui indeks Gini pendapatan

nelayan sebesar 0,31 ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan pada sub sektor perikanan adalah sedang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah lebih mengfokuskan pada distribusi pendapatan nelayan yang meliputi distribusi pendapatan perorangan dan distribusi pendapatan fungsional nelayan.

- c. Dina Tias Sriyadi (2007) “Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga dan Distribusi Penguasaan Lahan Di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan rumahtangga tergolong rendah menurut analisis gini dan kriteria bank dunia dengan hasil 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati 17,13% dari total pendapatan masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis melihat distribusi pendapatan nelayan pada daerah penelitian yang berbeda dengan temuan sejenis ini.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian Distribusi Pendapatan Nelayan di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Distribusi Pendapatan Perorangan (*personal distribution of income*) merupakan ukuran yang secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan tersebut tidak dipermasalahkan dan dalam hal ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, apakah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun warisan.

Distribusi Pendapatan Fungsional yaitu distribusi yang berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Dalam distribusi pendapatan fungsional ini dimaksudkan yaitu nelayan yang sebagai pemilik modal seperti pemilik kapal, pemilik bagan dan pemilik payang yang pendapatan diperoleh dari penggunaan kapal yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan di laut.

C. Hipotesis

Distribusi pendapatan nelayan di nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Distribusi pendapatan perorangan nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan berada pada ketimpangan sedang.
2. Distribusi pendapatan fungsional nelayan nagari Ampang Pulau kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan berada pada ketimpangan sedang.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 89 orang nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan perorangan nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil Gini Rasio sebesar 0,414 yang berarti distribusi pendapatan perorangan nelayan berada pada kategori ketimpangan sedang dengan rata-rata pendapatan perorangan nelayan sebesar Rp.1.478.719,10,- per minggu.
2. Kondisi ketimpangan distribusi pendapatan fungsional nelayan di nagari Ampang Pulai kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil Gini Rasio sebesar 0,413 yang berarti distribusi pendapatan fungsional nelayan berada pada kategori ketimpangan sedang dengan rata-rata pendapatan fungsional nelayan sebesar Rp.1.411.921,35,- per minggu.

B. Saran

1. Bagi nelayan yang mempunyai pendapatan rendah yang berada di bawah Rp.360.000,- diharapkan mempunyai mata pencaharian lain di luar sektor perikanan sehingga distribusi pendapatan perorangan nelayan lebih merata.

2. Dalam upaya memperbaiki distribusi pendapatan nelayan, agar pemerintah memberikan penyuluhan kepada nelayan dalam hal pengelolaan factor-faktor produksi supaya pendistribusian pendapatan fungsioanl semakin merata.
3. Bagi pemerintah daerah maupun pusat agar memberikan bantuan berupa modal kepada nelayan yang mempunyai pendapatan rendah sehingga mampu memanfaatkan bantuan tersebut dalam hal membuka usaha sampingan maupun peningkatan kualitas faktor-faktor produksi sehingga membantu meratakan distribusi pendapatan nelayan secara keseluruhan..

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, A Kosim. 1980. *Ekonomi Pertanian*. Edisi Kedua. PT. Soron Pacenongan: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi: Yogyakarta.
- Asmadia, Rory. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta: Padang
- Boediono. 1982. *Teori Pertumbuhan Penduduk*. LP3ES: Jakarta.
- BPS. 2006. *Gini Rasio Kota Padang*. Badan Pusat Statistik: Padang.
- , *Pesisir Selatan Dalam Angka*. Biro Pusat Statistik Pesisir Selatan
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. 2007. *Data Statistik Perikanan Kab. Pesisir Selatan*: Painan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kec. Koto XI Tarusan. 2007. *Data Statistik Perikanan Kec. Koto XI Tarusan*: Tarusan.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga : Jakarta.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara: Jakarta.
- Jhingan, ML. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lestari, Rini. 2005. *Pengaruh Pendidikan Orang Tua, Jumlah Anak Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Nelayan di Kecamatan Padang Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang: Padang.
- Melani, Anggun E.Y. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan Perkapita di Sumatera Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang: Padang.
- Mubyarto, 1985. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi Keempat: Jakarta.